

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanpa adanya partai politik di negara demokrasi maka dipastikan bahwa sistem demokrasi pun tidak bisa berputar untuk bekerja dan tidak bisa dihindarkan lagi dengan berfungsinya dan berjalannya dari suatu aktivitas negara yang berdemokrasi ini akan menggantungkan kehidupannya pada partai politik di dalamnya. Hal ini yang mendasari mengapa sistem demokrasi dipilih oleh Indonesia dalam mengelola sistem pemerintahan di dalam negara. Indonesia seperti yang kita ketahui sebagai salah satu negara yang menjalankan sistem demokrasi dengan hadirnya partai politik menjadi pertanda bahwa partai politik dapat digunakan sebagai salah satu wadah yang esensial dalam menciptakan negara yang demokratis. Berbicara tentang partai politik tidak dapat dibohongi bahwa kehadiran partai politik akan menjadi pilar dari penerapan demokrasi yang sesungguhnya.

Hadirnya partai politik di negara demokrasi akan sangat berguna untuk memperjuangkan berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat, sebab sebagai penghubung partai politik memiliki akses untuk memperjuangkan suara rakyat. Pada persoalan ini, maka partai politik pun mengemban kewajiban untuk mengelola fungsinya sebagai partai politik seperti fungsi untuk menyosialisasikan terkait politik, fungsi sebagai komunikator atau penghubung yang memiliki akses kepada pemerintah

dan rakyat, fungsi dalam melakukan penjaringan kandidat atau biasa dikenal dengan rekrutmen politik serta fungsi sebagai penengah dalam arti pengatur konflik apabila terjadi keributan antara pemerintah dan masyarakat.¹

Tercantum pada UU No. 2 Tahun 2008 yang berbicara tentang Partai Politik tepatnya di Pasal 11 ayat (1) dijelaskan dalam partai politik tentunya akan memiliki fungsi utamanya seperti : (1) memiliki fungsi untuk melaksanakan sarana pendidikan politik yang bertujuan untuk mengedukasi anggota hingga masyarakat umum supaya nantinya masyarakat Indonesia menyadari apa saja yang menjadi kewajiban dan haknya dalam aktivitas bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, (2) sebagai alat dalam menciptakan suasana yang kondusif hal ini bertujuan untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia agar masyarakat sejahtera, (3) sebagai tempat untuk menghimpun, penyerapan dan juga sebagai distributor aspirasi politik yang berasal dari masyarakat untuk nantinya ditetapkan dan dirumuskan suatu kebijakan, (4) sebagai tempat untuk masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam dunia politik, (5) sebagai alat untuk menjalankan aktivitas dalam pengisian jabatan politik yang dilakukan dengan cara membuka rekrutmen politik yang tentunya dijalankan dengan mekanisme sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan memperhatikan kesetaraan dan juga keadilan gender.²

Dari penjelasan diatas, terlihat banyaknya fungsi yang harus diaplikasikan oleh partai politik sehingga partai politik yang hadir saat ini diartikan ada yang meharuskan

¹ Miriam Budiardjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 405 – 408

² Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

memiliki kapastias dalam membangun partai politiknya sehingga nantinya partai politik memiliki kapasitas yang sesuai dalam pemenuhan yang sudah tertuang dalam UU. Dari realita yang terdapat di sekitar bahwa ciri utama masyarakat Indonesia yang multikulturalisme yang dimana beraneka ragam semestinya terakomodasi oleh hadirnya partai politik sekarang.³

Dalam masa reformasi, kehadiran partai politik terlihat mengalami krisis yang dimana partai politik terlihat representasi yang buruk dimata masyarakat. Hal ini bisa terjadi sebab partai politik yang dibangun pada saat itu belum sanggup dalam melakukan serta menjalankan fungsinya yang memang seharusnya dijalankan secara profesional oleh partai politik. Partai politik belum sanggup untuk menjadi wakil dari kepentingan masyarakat ataupun sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kondisi ini diperparah kembali pada aspek pelebagaan partai politik yang belum sempurna. Huntington salah satu ahli mengatakan pelebagaan partai ialah proses untuk menguatkan partai politik baik memola pada wujud perilaku ataupun dari sikap atau budaya. Huntington mengatakan situasi pembanguan politik terpenting tidak sekadar jumlah partai saja namun sejauh mana sistem kepartaian tersebut memiliki daya adaptasi dan tentunya harus kuat.⁴

³ Teguh Imansyah, "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelebagaan Partai Politik", Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 3, 2012, hlm. 376

⁴ Lili Romli, "Masalah Kelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru", Jurnal Penelitian Politik, Vol. 5 No. 1, 2008, hlm. 21

Ciri utama yang terlihat jelas melihat partai politik bisa dikatakan kuat dan memiliki daya adaptasi ialah partai politik tersebut bisa menyatukan dan menyerap seluruh kapasitas sosial yang baru hadir dari dampaknya modernisasi. Pada pandangan ini maka terlihat bahwa jumlah partai politik yang ada menjadi esensial jika partai politik bisa mempengaruhi kapasitas sistem dan membentuk satu kesatuan kelembagaan yang dibutuhkan dalam mewadahi partisipasi politik. Suatu sistem kepartaian yang kuat menurut Huntington setidaknya akan terdiri dari dua kapasitas (1) melangsungkan keikutsertaan politik dengan cara melewati alur partai sehingga dapat mengonversikan semua bentuk kegiatan politik anomik dan kekerasan, (2) menangkap partisipasi dari segolongan kelompok yang baru dimobilisasi dengan tujuan mengurangi tekanan yang dilewati oleh sistem politik. Partai politik dari hal tersebut masih mengalami persoalan di sisi kelembagaan maupun pelaksanaan demokrasi internalnya.⁵

Huntington juga menyebutkan partai politik timbul untuk beradaptasi dengan empat tahapan esensial yakni faksioanlisme, polarisasi, ekspansi dan institusionalisasi. Didasarkan dari empat tahapan tadi, Huntington menempatkan pelebagaan partai politik berada di tingkat paling tinggi dalam tingkatan tumbuh dan berkembnagna partai politik, dalam konteks ini mengapa pelebagaan itu penting dalam tubuh partai politik sebab mengarahkan sejauh apa langkah partai politik dapat menduduki kematangan baik dalam (internal) dan luar (eksternal) sebagai sebuah

⁵ Ibid, hlm 22

lembaga yang demokratis maka partai politik berupaya bertahan di tengah gempuran politik sekarang ini.⁶

Di Indonesia pelembagaan partai politik masih terjadi kendala, pelembagaan partai politik ini bisa dikonsepsikan sebagai sebuah kondisi dimana jika sistem yang dibuat partai politik dengan berbagai macam regulasinya dihargai dan dijalankan dengan stabil sehingga muncul budaya, pola dan sikap dalam internal partai politik. Namun justru sekarang ini pelembagaan partai masih berjalan statis hingga menunjukkan kemunduran dan banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya mengapa pelembagaan partai politik masih ditemukan berbagai permasalahan di dalamnya.

Penyelenggaraan musyawarah semu pada kesempatan yang khusus sering ditemukan dalam keputusan partai politik disahkan oleh sebelah pihak dan hal ini justru timbul hukuman apabila terdapat pembangkang dan dianggap loyal dapat langsung diputuskan tanpa melalui tingkatan atau prosedur pemeriksaan. Dampak yang ditimbulkan dari pelembagaan partai yang melemah terdapat pada prosedur kaderisasi yang tidak hidup namun tetap berjalan yang mengizinkan timbulnya figur asing yang berada tepat dalam lingkaran kekuasaan untuk melangkah dan memperkuat kedudukannya.

⁶ Wessy Juni Saputri “Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 2

Kaderisasi yang membingungkan juga mengakibatkan kader dalam partai politik terpacu dalam bersembunyi pada patron tertentu yang membuat pola hubungan patron-client berjalan tanpa hambatan dan ini mengganggu demokrasi dalam internal partai sehingga pada akhirnya internal partai tidak sehat.⁷

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang menuliskan terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD selanjutnya terjadi penggantian dengan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, ada parameter yang terjadi pada partai khususnya pada pelebagaannya yakni :⁸

1. Ideologi yang digunakan oleh partai politik digunakan sebagai acuan platform, sikap dan pemahaman ideologis dan juga politik serta komitmen dan ini menjadi tujuan politik yang diidamkan.
2. Pada internal demokrasi terlihat dari implementasi regulasi serta mekanisme, keputusan yang diambil, sumber daya desentralisasi dan pengawasan kepada pelaksana kekuasaan serta pemilihan model kepemimpinan yang berjalan
3. Dalam sistem kaderisasi akan melibatkan persoalan yang menyangkut sistem rekrutmen serta kehadiran program kaderisasi yang jelas

⁷ Intan Rachmina Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia", Jurnal Universitas Pramita Indonesia", Vol. 4 No. 50, 2021, hlm. 63

⁸ Ahmad Gelora Mahardika, "Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelebagaan Partai Politik yang Demokratis", Jurnal Wacana Politik Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 123

4. Keterikatan internal yang terkait pada kesanggupan penyelesaian konflik internal
5. Relasi dengan konstituen serta otonomi keuangan yang dimana terkait dengan permasalahan keberlanjutan dan penataan sumber dana.

Terkait dengan pelebagaan partai politik, maka dekat hubungannya dengan aktor yang berpengaruh untuk membangun kelembagaan dalam partai politik. Aktor politik ini ialah orang yang memiliki pengaruh dan memiliki kekuasaan sentral walaupun tidak ditemukan di semua partai politik. Dilihat dari sudut pandang psikologi politik ternyata nyata adanya dampak hadirnya figur atau aktor pada eksistensinya di partai politik. Dari pandangan psikologi dapat menjadikan mengapa seorang pemimpin dapat dibenci atau disenangi dan apa faktornya jika menarik bisa itu latar belakangnya, motivasinya, sikapnya, karakternya hingga prestasinya.⁹

Sebagai salah satu fungsinya, maka partai politik menjalankan fungsi pengkaderan atau biasa disebut dengan rekrutmen dan fungsi rekrutmen ini menjadi penting sebab memiliki tujuan dalam menyediakan kader – kadernya yang memiliki kualitas, sehingga dengan kader yang berkualitas, suatu partai politik bisa menjadi partai yang memiliki potensi yang lebih besar dalam mengembangkan diri. Proses kaderisasi ialah proses untuk menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya sumber daya manusia ini akan memimpin sehingga diharapkan bisa melaksanakan dan

⁹ M. Ridoi, “Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 2

membangun partai politik dengan baik. Tentunya kaderisasi ini memiliki proses yang menyangkut dua persoalan penting yakni :¹⁰

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam peningkatan kemampuan yang dilihat pada segi kemampuan maupun keterampilan
2. Kemampuan dalam penyediaan kader ataupun sumber daya manusia dalam organisasi khususnya bagi kaum muda

Fungsi kaderisasi ini sesungguhnya tidak bisa terpisahkan pada penanaman etika-etika politik. Kaderisasi adalah salah satu alat untuk melakukan rekrutmen, penguatan pada ideologi politik dan pementapan komitmen. Proses kaderisasi ini juga sebagai salah satu upaya dalam menguatkan kelembagaan dalam partai yang merupakan sebuah orientasi untuk waktu yang lama. Oleh sebab itu proses kaderisasi ini penting dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sebab bertujuan memperkuat ikatan dalam partai politik. Tanpa adanya kaderisasi dalam partai politik maka partai politik tidak dapat berjalan, oleh karena itu setiap partai politik harus memiliki kaderisasi yang bagus untuk mendapatkan sistem kaderisasi yang baik. Dalam konteks ini dibutuhkan kerja sama dari pihak yang melaksanakan pengkaderan serta anggota baru yang akan berpartisipasi, sebab jika partai politik memiliki kader yang berkualitas maka partai politik tersebut juga akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga.

¹⁰ Nursal dan Azwa, "Peran Pimpinan Dalam Kaderisasi Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pekanbaru", Tesis JOM FISIP. Vol. 4 No. 2, 2017, hlm 3

Berbicara mengenai kaderisasi maka mata kita akan tertuju sosok pemimpin yang dapat ditemukan dalam organisasi politik yakni partai politik yang memiliki peran untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki wawasan serta kualitas skala nasional. Sebab pemimpin yang memiliki kualitas tidak saja bertujuan untuk kepentingan partai politik yang diwakilinya. Pada saat menjadi pemimpin secara nasional, maka pemimpin tersebut akan memimpin semua orang, sebab pemimpin tidak akan muncul dengan sendirinya melainkan harus melalui proses pendidikan baik itu formal maupun informal yang nantinya melalui pendidikan yang di dapatkan ini bisa membentuk karakter dan sifat dari pemimpin.

Melalui alurnya dalam sistem politik maka organisasi partai politik ialah organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Dalam konteks ini, partai politik harus melaksanakan tugas dalam tubuh partainya yang dikembangkan melalui cara seleksi, rekrutmen dan kaderisasi politik.¹¹

Selain menjalankan proses rekrutmen dalam tubuh partai politik, penting dikembangkan lebih lanjut terkait sistem pendidikan hingga kaderisasi untuk para kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat perlu mengingat penting adanya suatu transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, sebab hal ini tidak saja membicarakan mengenai sejarah, visi, misi dan juga strategi partai politik, namun juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan terkait bangsa dan negara. Sistem kaderisasi

¹¹ Firmanzah, "Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi" (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm 71

di dalamnya diperlukan untuk melaksanakan pengiriman keterampilan serta keahlian dalam berpolitik, hal ini bukan tanpa alasan, sebab sebagai penghasil calon-calon pemimpin yang berkualitas yang nantinya akan berkompetisi dengan partai politik yang lain dengan cara pemilihan umum maka hal ini merupakan tugas utama dari partai politik.

Sistem kaderisasi penting untuk memberikan sistem yang transparan yang memberikan wadah pada semua kader yang mempunyai potensi. Sehingga penting untuk diterapkan dalam partai politik untuk melakukan persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik, sebab para kader diharuskan untuk terbiasa dengan sistem persaingan yang sehat dan juga transparan. Sehingga dengan sistem persaingan yang sehat ini nantinya akan terbebas dalam lingkaran kolusi dan nepotisme dan hal inilah yang dapat menghadirkan calon-calon pemimpin yang memiliki kualitas tinggi ¹².

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia karena menjadi partai yang menang dalam pemilihan umum di tahun 2014 dan dengan hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) membuktikan mempunyai massa yang cukup banyak. PDI Perjuangan mempunyai simpatisan dan kader yang besar di dalamnya bahkan massa tersebut sudah tersebar dari Sabang hingga Merauke sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyita perhatian publik dan PDI Perjuangan diharapkan bisa menjalankan fungsinya

¹² Ibid, hlm 71-72

sebagai partai politik terutama untuk kaderisasi yang baik di dalamnya agar menciptakan pelebagaan partai yang baik juga.

PDI Perjuangan bisa dilihat sebagai salah satu partai politik yang sukses sebab mempunyai sistem yang baik dengan partai yang dikenal besar oleh masyarakat sehingga dengan sistem yang baik tadi, tentunya bisa mendukung dari citra partainya sebagai partai yang mampu untuk menghasilkan kader-kader dengan kompetensi yang baik dalam menduduki jabatan dalam kursi pemerintahan. Keberhasilan PDI Perjuangan dapat terlihat dari proses rekrutmennya dengan hadirnya tokoh politik sebut saja Presiden yang saat ini menjabat yakni Joko Widodo yang merupakan kader yang berasal dari PDI Perjuangan. Dalam konteks ini pun PDI Perjuangan juga terkenal dengan partai kader yang menjadikannya salah satu contoh partai politik yang mempunyai proses rekrutmen politik dan pendidikan kader yang bagus. Kaderisasi inilah sebagai hasil dari proses-proses pendidikan politik dalam waktu yang lama yang ditanamkan dalam diri kader terkait dengan nilai-nilai tertentu.¹³

PDI Perjuangan yang menggunakan ideologi Pancasila dalam menjalankan dan memperjuangkan cita-cita Proklamasi tahun 1945 dengan trisakti sebagai jalan dan arah nafas perjuangannya. PDI Perjuangan juga menyebut dirinya sebagai partai rakyat kecil dengan slogan yang dibuatnya yakni “partai ne wong cilik” PDI Perjuangan dalam upayanya mempunyai kader yang berdedikasi dan berwatak yang selaras dengan

¹³ Rahmat Sentosa, “Pola Kaderisasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing PDI Perjuangan di DPC PDI Perjuangan Seleman, Jurnal Adinegara, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm 68

partainya, maka diperlukan adanya kaderisasi di dalam internal PDI Perjuangan untuk mencapainya. Kaderisasi ini adalah suatu kebutuhan untuk partai politik yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas serta kapabilitas kader, kaderisasi juga digunakan untuk proses regenerasi dalam melaksanakan kelanjutan perjuangan dalam partai politik. Tetapi ada hal-hal yang menarik untuk diperhatikan bagaimana penerapan sistem kaderisasi yang komprehensif serta mapan untuk mencapai dan menghasilkan kader yang mempunyai kualitas, kapabilitas hingga konsistensi yang tidak berubah untuk melaksanakan ideologi perjuangan.¹⁴

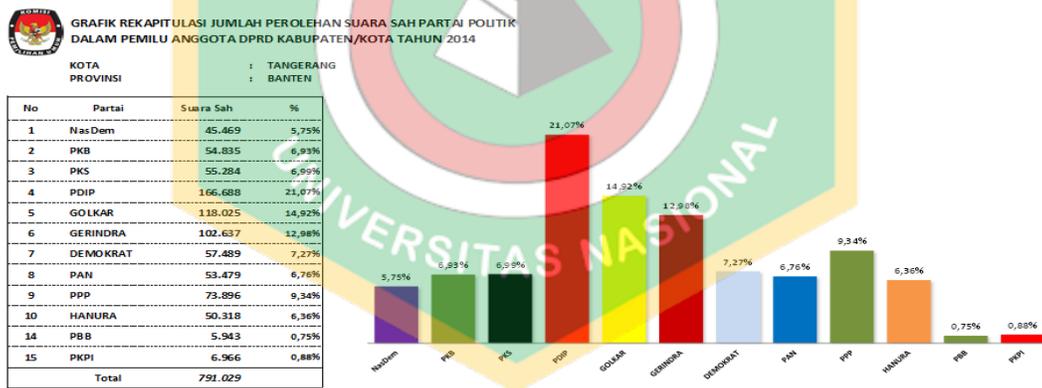
Dalam menghasilkan pelebagaan partai politik yang baik harus dibarengi dengan proses kaderisasi yang baik juga sehingga dalam penulisan penelitian ini penulis memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang mempunyai pola kaderisasi yang unik serta jarang digunakan oleh partai politik yang lain. Banyak hal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk melaksanakan kaderisasinya seperti mendirikan sekolah partai dalam rangka mengkader para anggotanya baik itu pada tingkat yang Pratama atau pada tingkat kabupaten/kota yang disusul dengan tingkat Madya yakni pada tingkat provinsi dan pada tingkat Utama yakni sebanding dengan Nasional.

Terjadi yang menarik terkait PDI Perjuangan khususnya di Kota Tangerang sesuai dalam penulisan penelitian skripsi ini dimana DPC PDI Perjuangan Kota

¹⁴ Hasan Ismail, Indah Murti, "Implementasi Kaderisasi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur", Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 4 No.2, 2018, hlm 1065

Tangerang mendapatkan fenomena menarik karena berhasil untuk mengantarkan para kadernya untuk menduduki beberapa posisi dalam pemerintahan khususnya dalam DPRD Kota Tangerang, dikatakan berhasil sebab PDI Perjuangan pada pemilihan calon legislatif ini berhasil menduduki sebanyak 10 kursi dalam DPRD Kota Tangerang di periode 2014-2019 dan juga pada periode 2019-2024 selama dua periode PDI Perjuangan Kota Tangerang unggul dalam mengantarkan kader- kadernya menduduki kursi di DPRD Kota Tangerang.

Terlihat pada gambar di bawah ini bahwa PDI Perjuangan berhasil dan unggul dalam menduduki kursi di DPRD Kota Tangerang dan memperoleh suara unggul pada tahun 2014-2019. Rekapitulasi suara dan perolehan kursi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. 1 Perolehan Suara DPRD Kota Tangerang Tahun 2014-2019

Sumber : KPU Kota Tangerang¹⁵

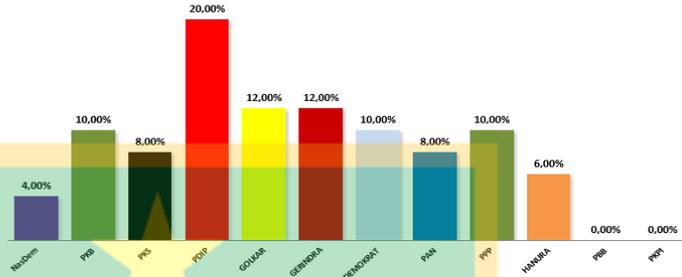
¹⁵ Data diambil dari sumber <https://web.archive.org/web/20200125031615/http://kpu-tangerangkota.go.id/pengumuman-penetapan-perolehan-suara-dan-kursi-partai-politik-serta->



**GRAFIK REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

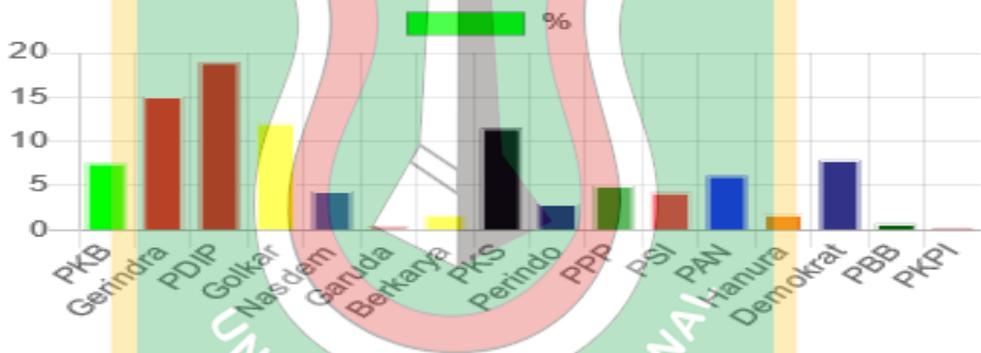
KOTA : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Partai	Jumlah Kursi	%
1	NasDem	2	4,00%
2	PKB	5	10,00%
3	PKS	4	8,00%
4	PDIP	10	20,00%
5	GOLKAR	6	12,00%
6	GERINDRA	6	12,00%
7	DEMOKRAT	5	10,00%
8	PAN	4	8,00%
9	PPP	5	10,00%
10	HANURA	3	6,00%
14	PBB	-	0,00%
15	PKPI	-	0,00%
Total		50	



Gambar 1. 2 Perolehan Kursi DPRD Kota Tangerang Tahun 2014-2019

Sumber : KPU Kota Tangerang¹⁶



Gambar 1. 3 Perolehan Suara DPRD Kota Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : KPU Banten¹⁷

Partai Politik	Perolehan Suara
PKB	7,52%
Gerindra	15,06%
PDIP	18,92%

[penetapan-calon-terpilih-anggota-dprpd-kota-tangerang-pemilu-tahun-2014/](#) . Pada 1 November 2022, pukul 16.45.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Data diambil dari sumber <https://rpp-kpubanten.id/suara/dprdkab/3671>. Pada 10 Oktober 2022, pukul 22:23

Golkar	12,02%
NasDem	4,37%
Garuda	0,33%
Bekarya	1,66%
PKS	11,49%
Perindo	2,92%
PPP	4,98%
PSI	4,22%
PAN	6,11%
Hanura	1,73%
Demokrat	7,89%
PBB	0,69%
PKPI	0,11%

Tabel 1. 1 Perolehan Suara DPRD Kota Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : KPU Banten¹⁸

Partai Politik	Perolehan Kursi
PKB	5
Gerindra	8
PDIP	10
Golkar	6
NasDem	3
Garuda	-
Bekarya	-
PKS	6
Perindo	-
PPP	3
PSI	1
PAN	3
Hanura	0
Demokrat	5
PBB	-
PKPI	-

Tabel 1. 2 Perolehan Kursi DPRD Kota Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : KPU Banten¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Dari diagram tabel dan diagram diatas, menunjukkan bahwa selain memiliki massa yang banyak, PDI Perjuangan juga memiliki kaderisasi yang baik sebab dari hasil perolehan suara yang terlihat, PDI Perjuangan memiliki perolehan suara yang unggul dan dari hal ini mengantarkan banyak kader-kader yang dapat menduduki kursi di DPRD Kota Tangerang periode 2014-2019 dan juga periode 2019-2024. Hal ini merupakan titik balik dari periode 1999 dimana DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang pernah menduduki 15 kursi di pemerintahan. Dikatakan titik balik sebab dari periode 2004 hingga periode 2009 DPC PDI Perjuangan hanya mendapatkan 5 kusi di pemerintahan. Perjalanan DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang hingga 2 periode berturut-turut dan bertahan menduduki kursi mayoritas tentu tidak berjalan mulus, sebab terdapat konflik internal partai yang membuat konsolidasi dalam internal partai terganggu, namun DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang tetap bisa meraih perolehan suara yang unggul walaupun terdapat permasalahan internal partai dan bisa bangkit untuk memperoleh kursi mayoritas. Hal ini menandakan pelebagaan dan kaderisasi yang dilakukan bisa dikatakan berhasil. Sehingga hal ini membuat penulis ingin meneliti terkait pelebagaan dan sistem kaderisasi dalam DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang.

Terkait daerah pemilihan, Kota Tangerang termasuk daerah yang memiliki wilayah yang luas dan wilayah di Kota Tangerang terbagi ke dalam lima daerah pemilihan yakni :

Nama Dapil	Wilayah Dapil
Kota Tangerang 1	Karawaci, Tangerang
Kota Tangerang 2	Batuceper, Benda, Neglasari
Kota Tangerang 3	Cipondoh, Pinang
Kota Tangerang 4	Karang Tengah, Ciledug, Larangan
Kota Tangerang 5	Cobodas, Jatiluwung, Periuk

Tabel 1. 3 Daerah Pemilihan Kota Tangerang

Sumber : KPU Banten²⁰

1.2. Rumusan Masalah

Pentingnya kaderisasi dalam suatu partai politik untuk menciptakan kader yang berkualitas dan juga untuk menciptakan pelebagaan partai politik yang baik, maka dibutuhkan adanya sistem kaderisasi dan pelebagaan partai politik yang selaras dan saling bekerja sama agar partai politik tetap bertahan memiliki pelebagaan dan kaderisasi yang baik.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih dalam lagi terkait sistem kaderisasi dan juga pelebagaan yang terjadi dalam DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang yang berhasil untuk mengantarkan dan mencetak para kader-kader yang berkualitas. Dengan sistem kaderisasi yang baik ini maka di dalamnya juga akan menyinggung terkait pelebagaan partai di dalamnya yang tentu

²⁰ Ibid

akan berpengaruh dalam sistem kaderisasinya. Sehingga dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelebagaan dan sistem kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang?
- b. Apa saja faktor pendorong dan penghambat kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kaderisasi dan juga pelebagaan dalam DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam sistem kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini nantinya penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini nantinya diharpkn memberi manfaat baik itu untuk penulis

maupun bagi para pembaca yang nantinya akan membaca penelitian skripsi ini yang diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Dalam hasil kajian penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah dalam ilmu politik, penulis berharap nantinya hasil penulisan penelitian ini bisa berguna untuk studi ilmu politik khususnya dalam mata kuliah partai politik dengan fokus kajiannya pada pelebagaan partai politik dan sistem kaderisasi partai politik.
- b. Dalam penelitian ini mencoba untuk mengimplemntasikan teori pelebagaan politik dan konsep kaderisasi.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penulisan penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis dengan mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari sebelumnya melalui penulisan penelitian ini selain itu juga penulis mempelajari bagaiman pelebagaan dan sistem kaderisasi dalam DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang.
- b. Bagi pembaca, penulisan penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjawab bagaimana pelebagaan dan sistem kaderisasi serta faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang.

1.5. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis, maka penyusunan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan permasalahan partai politik di Indonesia yang di dalamnya terdapat permasalahan pelembagaan dalam tubuh partai politik, selain itu juga lemahnya kaderisasi partai politik di Indonesia. Pada bab ini dijelaskan juga bagaimana DPC PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar yang memiliki pelembagaan dan kaderisasi yang baik sebab dapat bangkit setelah dua periode sebelumnya hanya mendapat sedikit kursi di pemerintahan. Selain itu juga terdapat konflik internal partai, namun pelembagaan dalam partai masih dapat berjalan dengan baik dan kaderisasi yang dijalankan juga berhasil sehingga mengantarkan para kader yang berkualitas.

BAB II KAJIAN PUSTAKA :

Berisi berisi tentang kajian pustaka yang di dalamnya berisi kajian-kajian atau penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dan perbandingan dari penelitian yang ada sebelumnya dan terdapat beberapa jurnal yang menjadi acuan sebagai tinjauan pustaka. Dalam bab ini juga dijelaskan teori-teori yang digunakan oleh penulis seperti teori kaderisasi, teori pelembagaan partai politik dan juga teori partai politik sebagai teori pendukung.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN :

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dimana penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk pengumpulan datanya menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan oleh penulis dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen tambahan untuk mendukung penulisan penelitian dan setelah data didapatkan semua selanjutnya penulis melakukan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM :

Berisi tentang gambaran umum Kota Tangerang mulai dari sejarahnya, demografi hingga pada sosial budaya, lalu gambaran umum PDI Perjuangan dengan menjelaskan visi dan misi serta sejarahnya dan juga gambaran dari DPC PDI Perjuangan yang disertai dengan struktur kepengurusannya.

BAB V PEMBAHASAN :

Berisi tentang pemaparan dari hasil-hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai sistem kaderisasi dan pelebagaan serta faktor- faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam sistem kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang yang akan dijelaskan dengan rinci dan sesuai dengan rumusan masalah serta teori yang digunakan oleh penulis yakni teori

pelembagaan yang mencakup empat aspek dan kaderisasi yang dimana hasil penelitian ini di dapatkan dengan cara wawancara dengan narasumber.

BAB VI PENUTUP :

Berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yang berisi point-point penting dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan secara rinci di dalam bab sebelumnya dan menjawab seluruh rumusan masalah di dalam penulisan penelitian ini.

